

PEMBANGUNAN POLITIK

Kata pembangunan mungkin saja sangat akrab di telinga kita. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Namun, dalam sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai manifestasi fisik, (Kartono & Nurcholis, n.d.). Huntington dalam (Haridison, 2013) menekankan bahwa pembangunan politik bukanlah fenomena yang terisolasi, tetapi memiliki beberapa dimensi. Menurutnya, pengertian pembangunan politik dapat dilihat secara geografis, derivatif, teleologis dan fungsional (1) Geografis berarti bahwa perubahan politik telah terjadi di negara berkembang menggunakan konsep dan metode yang digunakan oleh negara maju. Tentu saja fenomena ini mempengaruhi kapasitas dan ketidakstabilan sistem politik. (2) Turunan berarti bahwa pembangunan politik adalah bagian dan konsekuensi politik dari proses perubahan umum, yaitu konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media dan banyak lagi. (3) Tujuan politik dipahami sebagai proses perubahan menuju tujuan tertentu dari sistem politik seperti stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, penegakan hukum, pemerintahan yang baik, dll. (4) Proses perubahan menuju sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh negara sudah berjalan.

Objek formal pembangunan politik terletak pada berfungsinya sistem politik itu sendiri. Berfungsinya sistem politik mempengaruhi dinamika dan mobilisasi kekuasaan. Dengan satu syarat, jika sistem politik dapat disesuaikan dengan tujuan politik individu atau kelompok, maka sistem itu akan terbentuk. Sebaliknya, ketika sistem politik tidak lagi mampu memberikan apa yang diinginkan, stabilitasnya akan dipertanyakan. Akibatnya, setiap individu dan kelompok kepentingan mendekonstruksi sistem politik dan berubah. Pembangunan politik selalu berarti perubahan, bukan sebaliknya. Memang di satu sisi perubahan diperlukan untuk pembangunan, namun di sisi lain perubahan juga dapat menghambat pembangunan, padahal pengaruh perubahan sosial dapat merangsang pembangunan. Dialektika antara pembangunan dan perubahan sosial selalu ambigu dan dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut.

BAB 3

BANGSA DAN NEGARA

A. PENDAHULUAN

Materi ini membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bangsa dan negara serta yang menjadi perbedaan antara bangsa dan negara

B. NEGARA

1. Pengertian Negara

Secara etimologis, negara berasal dari kata *staat* (Belanda dan Jerman), *state* (Inggris), *eta* (Perancis), *satuts/satatum* (Latin), yang diartikan merupakan meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Sedangkan pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) negara memiliki dua pengertian. Pertama negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Definisi Negara dari para ahli:

1) Roger H. Soltau

Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

2) Harold J. Laski

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Sedangkan masyarakat adalah suatu kelompok

manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan bersama.

3) Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah.

4) Robert M. Maclever

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan system hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuatan memaksa

2. Unsur Dasar Negara

Suatu negara dapat dikatakan sebuah negara apabila memenuhi unsur-unsur negara. Diantaranya unsur bersifat konstitutif dan unsur yang bersifat deklaratif.

1) Bersifat Konstitutif, adalah unsur yang mutlak harus ada pada saat suatu negara didirikan, unsur ini meliputi:

a. Wilayah

Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan yang penuh tentu diperlukan wilayah yang terdiri dari, darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan. Tapi beberapa wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan sebagai bentuk satu kesatuan wilayah.

b. Rakyat/Masyarakat

Rakyat adalah kumpulan manusia yang terdiri dari beberapa orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Tanpa adanya orang sebagai rakyat dalam suatu negara maka tentu pemerintahan tidak dapat berjalan, karena rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan semua aktifitas dalam kehidupan sehari-hari.

c. Pemerintahan yang berdaulat

Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap suatu wilayah dan kekuasaannya baik ke luar ataupun ke dalam. Tetapi kekuasaan yang dimiliki suatu Negara terbatas pada wilayah Negara tersebut. Dengan kata lain

dalam kedaulatan suatu Negara terbatas pada kedaulatan Negara lainnya.

2) Bersifat Deklaratif adalah unsur yang tidak mutlak atau yang tidak harus ada ketika suatu negara berdiri, tetapi unsur ini dipenuhi setelah suatu negara berdiri

a. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang sudah ada atau fakta yang nyata adanya tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan *de facto* juga tergolong menjadi dua, yakni:

- Pengakuan *de facto* yang bersifat tetap, artinya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi.
- Pengakuan *de facto* bersifat sementara, artinya pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Jika negara itu hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya.

b. Pengakuan *de jure*

Pengakuan *de jure* adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Pengakuan *de jure* terbagi menjadi:

- Pengakuan *de jure* bersifat tetap, yang berarti pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena kenyataan memperlihatkan adanya pemerintahan yang stabil.
- Pengakuan *de jure* bersifat sementara, yang artinya adalah terjadinya hubungan antarnegara yang mengakui dan diakui dalam hubungan ekonomi, dagang, serta diplomatik. Negara yang mengakui berhak mempunyai konsulat atau kedutaan di negara yang diakui tersebut.

3. Fungsi Negara

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuasaan pada negara tertentu dan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini negara mengatur kehidupan bermasyarakat dengan jelas secara yuridis

guna mewujudkan ketertiban dan guna kepentingan bersama. Aturan yang dibuat oleh negara tentu wajib ditaati oleh setiap masyarakat guna tercapainya tujuan dan cita-cita suatu negara dan membangun kehidupan yang damai serta sejahtera.

Secara umum, negara mempunyai beberapa fungsi diantaranya untuk menjamin kehidupan bernegara yang baik dan setiap fungsi negara tersebut mempunyai perannya masing-masing. Namun tetap mengacu pada yang sama yaitu mencapai kehidupan negara yang layak bagi rakyatnya. Fungsi negara secara umum ada empat, yaitu:

a. Fungsi ketertiban

Fungsi negara yang pertama adalah fungsi melaksanakan ketertiban. Fungsi ini tentu sangat penting terutama untuk mencegah terjadinya pertikaian antar warga, dan menciptakan suasana lingkungan yang kondusif serta ketertiban umum yang tentunya didukung penuh oleh masyarakat.

b. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran

Memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya dapat dikatakan sebagai yang sukses dan maju baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu berbagai upaya yang dilakukan oleh negara untuk melaksanakan fungsi ini diantaranya adalah pembangunan segala bidang yang menciptakan kondisi perekonomian yang stabil.

c. Fungsi pertahanan

Fungsi pertahanan bagi suatu negara merupakan fungsi yang sangat penting, untuk mencegah kemungkinan terjadinya serangan atau kejahatan dari luar. Salah satu kewajiban negara adalah melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahannya dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan baik dari dalam ataupun dari luar, oleh setiap itu negara mempunyai alat-alat pertahanan serta personel keamanan sudah terlatih dan tangguh.

d. Fungsi keadilan

Fungsi negara ini dilaksanakan oleh aparat atau aparat penegak hukum. Khususnya di badan-badan peradilan. Negara harus memberikan jaminan kepada rakyatnya untuk dapat menegakkan hukum secara tegas dan adil tanpa adanya unsur kepentingan.

4. Sifat-sifat Negara

Negara pada dasarnya adalah sebuah organisme yang memiliki sifat-sifat khusus sebagai politik organisasi. Kekuasaan sebuah negara terberlandaskan pada sebuah aturan tertulis. Seperti Indonesia aturan tertulisnya adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Negara memiliki sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan negara itu sendiri. Sifat-sifat negara umumnya mengikat bagi setiap warga negara. Adapun sifat-sifat negara adalah:

1) Sifat Memaksa

Negara mempunyai sifat memaksa, artinya negara memiliki kewenangan untuk mewajibkan seluruh masyarakat untuk patuh dan tunduk terhadap semua peraturan yang berlaku secara tertulis dan dalam perundang-undangan.

2) Sifat Monopoli

Negara punya sifat monopoli artinya negara mempunyai hak tunggal atau hak melakukan monopoli terhadap warga negaranya, misalnya menetapkan dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut, seperti menetapkan system politik, ideologi, dll.

3) Sifat Universal

Sifat negara ini mencakup semua yaitu segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Artinya setiap warga negara yang berada di suatu negara tersebut harus mematuhi semua aturan yang berlaku di negara tersebut.

5. Teori Terbentuknya Negara

Setiap negara tidak secara otomatis terbentuknya dengan sendirinya, tetapi sebuah negara lahir dari proses yang Panjang dan setiap negara memiliki sejarah tentang kemunculannya. Adapun teori-teori tentang terbentuknya negara adalah:

1) Teori Ketuhanan (Teokrasi)

Teori ketuhanan merupakan teori tertua dalam teori terbentuknya negara. Teori ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki oleh seorang raja bersumber dari tuhan. Mereka sebagai penguasa negara adalah mereka yang mendapat mandate dari tuhan dan menganggap diri mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan atau

mewakili tangan tuhan yang bertanggungjawab dengan kekuasaan serta mempertanggungjawabkannya hanya kepada Tuhan, bukan manusia.

Dalam teori ini ketuhanan, ada keyakinan bahwa siapa pun yang menantang penguasa atau raja maka dia dianggap melawan peraturan tuhan dan akan menerima balasan atas perbuatannya.

2) Teori Hukum Alam

Terbentuknya negara dapat terjadi karena adanya kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat dan bersifat universal dan tidak berubah. Teori hukum alam berpandangan bahwa terbentuknya sebuah negara karena adanya kehendak dari alam. Thomas Aquinas memaparkan jika pembentukan serta keberadaan negara tidak dapat lepas dari hukum alam. Hal ini beranggapan bahwa secara hukum alam manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.

3) Teori Kontrak Sosial

Teori kontak sosial atau dikenal dengan teori perjanjian masyarakat menganggap bahwa terbentuknya suatu negara karena berdasarkan perjanjian-perjanjian, dimana masyarakat mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapat perlindungan dan jaminan kelangsungan hidup mereka.

4) Teori Kekuatan

Teori kekuatan menyatakan bahwa terbentuknya negara sebagai salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Secara sederhana dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena disebabkan adanya dominasi negara yang kuat menjajah suatu negara lain serta disebabkan adanya pertarungan kekuatan, yang mana pemenangnya akan membentuk semua negara.

C. BANGSA

1. Pengertian Bangsa

Secara Bahasa, kata bangsa merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris, yaitu Nation. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bangsa dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang

memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, serta sejarahnya, dan memiliki pemerintahan sendiri.

Beberapa ahli memberikan pengertian tentang bangsa, diantaranya:

- a. Ernest Renan, bangsa sebagai jiwa spirit spiritual. Satu jiwa terletak di masa lalu dan satu lagi terletak di masa sekarang. Jiwa tersebut adalah kepemilikan bersama dari warisan memori masa lalu dan jiwa lainnya adalah persetujuan masa kini, keinginan untuk hidup bersama, dan melestarikan nilai yang diwariskan.
- b. Mohammad Hatta, bangsa adalah suatu persatuan yang ditentukan oleh keinsyafan, sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu yaitu terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan.
- c. Rudolf Kjellen, bangsa adalah sebuah analisis atau analogi yang membandingkan antara bangsa dan suatu organisme biotik dengan cara menyamakan dari jiwa bangsa berdasarkan nafsu hidup organisme tersebut.
- d. Rawink, bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu padu atas sebuah wilayah dan juga memiliki keterikatan terhadap wilayah tersebut, bagi kumpulan manusia tersebut, batas teritorial tertentu adalah hal yang paling dapat dilihat dari letaknya dalam geografis atas wilayah tertentu.
- e. Otto Bauer, bangsa adalah komunitas individu dengan karakteristik yang relatif sama. Kesamaan karakteristik ini terbentuk karena adanya persamaan nasib. Dengan begitu, satu bangsa akan berbeda dengan bangsa lainnya.
- f. Hans Kohn, bangsa adalah hasil perjuangan sejarah manusia yang tidak bisa dirumuskan secara pasti. Hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor objektif yang menjadi latar belakang dan ciri khas suatu bangsa, seperti persamaan rasa tau keturunan, wilayah, bahasa, adat-istiadat, dan agama atau keyakinan.
- g. Anthony D. Smith, bangsa adalah komunitas yang memiliki nama, menguasai suatu tanah air, memiliki mitos-mitos dan sejarah bersama, budaya politik bersama, perekonomian tunggal dan hal serta kewajiban bersama bagi semua anggotanya.

2. Tujuan Bangsa

Sebuah bangsa tentu memiliki tujuan yang sama dalam pencapaiannya. Di negara Indonesia sendiri, tujuan bangsa tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara 1945 alinea ke IV. Secara umum yang tujuan sebuah bangsa adalah memberikan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya, kesejahteraan yang dimaksud tentu dalam semua hal baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam sebuah bangsa pembentukan pemerintah sangat penting, karena tanpa pemerintahan maka sebuah bangsa dan negara tidak dapat menjalankan kedaulatannya. Bangsa yang baik tentu melindungi rakyat dan melaksanakan ketertiban dunia yang memiliki dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

3. Ciri-ciri Sebuah Bangsa

Suatu bangsa memiliki ciri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan bentuk komunitas atau perkumpulan orang-orang. Melihat dari pengertian bangsa, Adapun beberapa ciri-ciri bangsa adalah sebagai berikut:

- a. Bangsa terdiri dari sekelompok atau perkumpulan manusia yang memiliki rasa kebersamaan yang tinggi serta satu kesatuan
- b. Memiliki rasa nasionalitas sesama anggotanya dan memiliki sikap kebangsaan
- c. Memiliki identitas yang khusus seperti agama, ras, suku, Bahasa dan budaya. Hal ini sebagai pembeda dengan bangsa lainnya
- d. Memiliki wilayah yang dapat digunakan untuk sebagai tempat berkumpul dan hidup bersama-sama
- e. Memiliki Lembaga pemerintahan dan ruang lingkupnya
- f. Membentuk system pemerintahan serta aturan yang digunakan untuk mengatur anggota masyarakat yang berada didalamnya.

4. Faktor Pembentuk Sebuah Bangsa

Terbentuknya sebuah bangsa, terhadap beberapa faktor penting yang menjadi pembentuk dari bangsa tersebut. Adapun faktor pembentukan sebuah bangsa adalah:

a. **Memiliki persamaan nasib**

Salah satu yang menjadi faktor terbentuknya sebuah bangsa adalah adanya persamaan nasib atau persamaan kondisi dan situasi yang dihadapi pada saat itu. Contohnya pada bangsa Indonesia memiliki persamaan nasib, dimana bangsa Indonesia berada di bawah penderitaan yang sama yaitu dijajah oleh bangsa asing. Hal ini yang menjadi latar belakang terbentuk sebuah bangsa.

b. **Memiliki tujuan**

Sebuah bangsa tentu mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin memberikan kesejahteraan untuk rakyat atau memiliki keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang layak, memiliki kemerdekaan tanpa dijajah oleh bangsa asing. Sehingga karna adanya kesamaan tujuan ke arah yang lebih baik maka terbentuknya sebuah bangsa.

c. **Memiliki satu kesatuan tempat tinggal**

Kondisi geografis atau wilayah yang ada di suatu negara juga menjadi factor terbentuknya suatu bangsa. Wilayah juga merupakan satu kesatuan terbentuknya suatu bangsa, karena kondisi

5. Unsur Terbentuknya Bangsa

Dalam terbentuknya sebuah bangsa, terdapat beberapa unsur-unsur yang penting di dalamnya. Adapun unsur-unsur terbentuknya sebuah bangsa adalah:

a. **Unsur sosio-antropologis**

Unsur terbentuknya sebuah bangsa dalam arti sosio-antropologis yang dimaksud adalah kumpulan masyarakat memiliki sifat etnik atau alami. Kesamaan wilayah atau tanah kelahiran bangsa juga menjadi salah satu unsur terbentuknya sebuah bangsa, dengan budaya, agama, Bahasa dan persamaan darah yang dimiliki seseorang maka terbentuknya suatu ikatan atau kekerabatan yang erat dan dekat. Sehingga dengan adanya factor kesamaan terbentuklah suatu bangsa atau masyarakat dengan rasa kebangsaan yang tinggi.

b. **Unsur politis**

Unsur politik merupakan unsur yang dibuat dengan sengaja berdasarkan kesepakatan umum. Salah satu bentuk unsur politis adalah adanya suatu keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan dan

kebebasan secara menyeluruh sehingga tercipta kehidupan damai dan sejahteranya

D. PERBEDAAN BANGSA DAN NEGARA

Istilah bangsa dan negara, memang sudah tidak asing lagi didengar. Banyak orang beranggapan bahwa bangsa dan negara adalah sama. Padahal, keduanya memiliki definisi dengan unsur yang berbeda. Dari segi pengertian dapat terlihat perbedaan bahwa bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan keturunan, asal, sejarah, dan bahasa. Sementara itu, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang membentuk suatu organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan. Selain dari pengertian, terdapat banyak perbedaan bangsa dan negara dari berbagai aspek, diantaranya:

1. Perbedaan bangsa dan negara berdasarkan pembentuknya
Perbedaan bangsa dan negara terletak pada unsur pembentuknya. Sebuah bangsa terbentuk dari adanya keberadaan sekelompok individu yang memiliki kesamaan satu sama lain, seperti agama, ras, adat istiadat, dan Bahasa. Sedangkan sebuah negara terdiri dari sekelompok individu yang pada suatu wilayah tertentu dan diatur oleh hukum dan pemerintah.
2. Perbedaan bangsa dan negara berdasarkan anggota
Perbedaan bangsa dan negara yang dapat kita lihat melalui anggota kelompok yang ada didalamnya. Sebuah bangsa hanya terikat karena memiliki persamaan tertentu seperti kesamaan Bahasa, agama dan budaya, tidak ada bukti secara nyata baik secara fisik, dokumentasi maupun identitas. Sedangkan, sebuah negara setiap anggota memiliki kesamaan yaitu dengan adanya bukti identitas yang jelas seperti kartu tanda pengenal atau sejenisnya.
3. Perbedaan bangsa dan negara berdasarkan batasan wilayah
Perbedaan yang paling terlihat antara bangsa dan negara adalah terletak pada batasan wilayah. Suatu bangsa tidak memiliki batasan wilayah yang harus disepakati secara hukum, karena memiliki persamaan agama, rasa dan budaya tidak terikat oleh wilayah. Sedangkan negara diatur batasan-batasan yang jelas dan tertulis, jika

dilanggar maka ada sanksi yang diberikan oleh pemerintahan negara lain yang berlaku

4. Perbedaan bangsa dan negara berdasarkan sifatnya

Perbedaan bangsa dan negara dapat dilihat melalui sifatnya. Pada sebuah bangsa tidak ada ikatan yang bersifat terikat dan memaksa kepada anggota masyarakatnya. Sedangkan negara memiliki aturan yang jelas dan tegas yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat di dalamnya. Aturan tersebut resmi dibuat secara tertulis dan diundangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disertai dengan sanksi ataupun ancaman bagi yang melanggar aturan tersebut.

E. RANGKUMAN MATERI

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) negara memiliki dua pengertian. Pertama negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
- Negara mempunyai beberapa fungsi diantaranya untuk menjamin kehidupan bernegara yang baik dan setiap fungsi negara tersebut mempunyai perannya masing-masing. Namun tetap mengacu pada yang sama yaitu mencapai kehidupan negara yang layak bagi rakyatnya. Fungsi negara secara umum ada empat, yaitu : Fungsi ketertiban, Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, Fungsi pertahanan dan Fungsi keadilan
- Negara pada dasarnya adalah sebuah organisme yang memiliki sifat-sifat khusus sebagai politik organisasi. Kekuasaan sebuah negara tentu berlandaskan pada sebuah aturan tertulis. Seperti Indonesia, aturan tertulisnya adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. negara memiliki sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan negara itu sendiri. Sifat-sifat negara umumnya mengikat bagi setiap warga negara

- Mohammad Hatta, bangsa adalah suatu persatuan yang ditentukan oleh keinsyafan, sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu yaitu terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan.
- Sebuah bangsa tentu memiliki tujuan yang sama dalam pencapaiannya. Di negara Indonesia sendiri, tujuan bangsa tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara 1945 alinea ke IV. Secara umum yang tujuan sebuah bangsa adalah memberikan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya, kesejahteraan yang dimaksud tentu dalam semua hal baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam sebuah bangsa pembentukan pemerintah sangat penting, karena tanpa pemerintahan maka sebuah bangsa dan negara tidak dapat menjalankan kedaulatannya
- Istilah bangsa dan negara, memang sudah tidak asing lagi didengar. Banyak orang beranggapan bahwa bangsa dan negara adalah sama. Padahal, keduanya memiliki definisi dengan unsur yang berbeda. Dari segi pengertian dapat terlihat perbedaan bahwa bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan keturunan, asal, sejarah, dan bahasa. Sementara itu, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang membentuk suatu organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan pengertian negara!
2. Jelaskan teori terbentuk suatu negara!
3. Jelaskan pengertian bangsa!
4. Jelaskan ciri-ciri sebuah bangsa!
5. Sebutkan dan jelaskan perbedaan bangsa dan negara!



PEMBANGUNAN POLITIK



Tim Penulis:

Ade Putra Ode Amane, Dortje L. Y. Lopulalan, Fahririn, Helin Garlinia Yudawisastra,
Abdul Rahman, Muhammad Nazif, Andi Hartati, Rahmad Palopa,
Yeyen Subandi, Ricky Santoso Muharam, Vina Dini Pravita,
Robert Tua Siregar.

PEMBANGUNAN POLITIK

Tim Penulis:

Ade Putra Ode Amane, Dortje L. Y. Lopulalan, Fahririn, Helin Garlinia Yudawisastra,
Abdul Rahman, Muhammad Nazif, Andi Hartati, Rahmad Palopa,
Yeyen Subandi, Ricky Santoso Muharam, Vina Dini Pravita,
Robert Tua Siregar.



PEMBANGUNAN POLITIK

Tim Penulis:

**Ade Putra Ode Amane, Dortje L. Y. Lopulalan, Fahririn, Helin Garlinia Yudawisastra,
Abdul Rahman, Muhammad Nazif, Andi Hartati, Rahmad Palopa,
Yeyen Subandi, Ricky Santoso Muharam, Vina Dini Pravita,
Robert Tua Siregar.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-459-1

Cetakan Pertama:

April, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Pembangunan Politik telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang “Pembangunan Politik”

Buku ini merupakan wujud perhatian penulis terhadap Pembangunan Politik. Kata pembangunan mungkin saja sangat akrab di telinga kita. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Namun, dalam sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai manifestasi fisik, (Kartono & Nurcholish, n.d.). Huntington dalam (Haridison, 2013) menekankan bahwa pembangunan politik bukanlah fenomena yang terisolasi, tetapi memiliki beberapa dimensi. Menurutnya, pengertian pembangunan politik dapat dilihat secara geografis, derivatif, teleologis dan fungsional. (1) Geografis berarti bahwa perubahan politik telah terjadi di negara berkembang menggunakan konsep dan metode yang digunakan oleh negara maju. Tentu saja fenomena ini mempengaruhi kapasitas dan ketidakstabilan sistem politik. (2) turunan berarti bahwa pembangunan politik adalah bagian dan konsekuensi politik dari proses perubahan umum, yaitu konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media dan banyak lagi. (3) Tujuan politik dipahami sebagai proses perubahan menuju tujuan tertentu dari sistem politik seperti stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, penegakan hukum, pemerintahan yang baik, dll. (4) Proses perubahan menuju sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh negara sudah berjalan.

Objek formal pembangunan politik terletak pada berfungsinya sistem politik itu sendiri. Berfungsinya sistem politik mempengaruhi dinamika dan mobilisasi kekuasaan. Dengan satu syarat, jika sistem politik dapat disesuaikan dengan tujuan politik individu atau kelompok, maka sistem itu

akan terbentuk. Sebaliknya, ketika sistem politik tidak lagi mampu memberikan apa yang diinginkannya, stabilitasnya akan dipertanyakan. Akibatnya, setiap individu dan kelompok kepentingan mendekonstruksi sistem politik dan berubah. Pembangunan politik selalu berarti perubahan, bukan sebaliknya. Memang di satu sisi perubahan diperlukan untuk pembangunan, namun di sisi lain perubahan juga dapat menghambat pembangunan, padahal pengaruh perubahan sosial dapat merangsang pembangunan. Dialektika antara pembangunan dan perubahan sosial selalu ambigu dan dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

April, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN PEMBANGUNAN POLITIK DAN URGENSINYA	1
A. Pendahuluan	2
B. Sejarah Pembangunan Politik	3
C. Perkembangan Pembangunan Politik	4
D. Pengertian Pembangunan	6
E. Pengertian Pembangunan Politik	8
F. Ciri Pembangunan Politik	12
G. Fungsi Pembangunan Politik	13
H. Perempuan Dalam Pembangunan Politik	15
I. Kabinet Kerja Jokowi: Nawacita Menuju Pembangunan Politik Ke Arah Pematangan Demokrasi	16
J. Rangkuman Materi	19
BAB 2 PERSOALAN-PERSOALAN PEMBANGUNAN POLITIK	23
A. Pendahuluan	24
B. Partisipasi Politik Masyarakat dan Budaya	25
C. Komunikasi Politik	32
D. Rangkuman Materi	40
BAB 3 BANGSA DAN NEGARA	45
A. Pendahuluan	46
B. Negara	46
C. Bangsa	51
D. Perbedaan Bangsa dan Negara	55
E. Rangkuman Materi	56
BAB 4 KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	59
A. Pendahuluan	60
B. Pengertian Kebijakan Publik	60
C. Pembangunan Ekonomi	65
D. Indikator dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi	66
E. Tujuan Pembangunan Ekonomi	69

F. Dampak Pembangunan Ekonomi	70
G. Hubungan Kebijakan Publik Terhadap Pembangunan Ekonomi	71
H. Implementasi Kebijakan Publik Terhadap	
I. Pembangunan Ekonomi.....	72
J. Rangkuman Materi	75
BAB 5 BUDAYA POLITIK DAN ISU IDENTITAS	79
A. Pendahuluan.....	80
B. Budaya Politik Indonesia	83
C. Isu Identitas Dalam Politik Indonesia	87
D. Politik Identitas: Ancaman Demokrasi Indonesia	93
E. Rangkuman Materi	98
BAB 6 MODERNISASI DAN INDUSTRIALISASI TERHADAP	
 PEMBANGUNAN POLITIK.....	101
A. Pendahuluan.....	102
B. Definisi Modernisasi	103
C. Definisi Industrialisasi	104
D. Pembangunan Politik.....	107
E. Hubungan Modernisasi Dengan Pembangunan Politik.....	108
F. Hubungan Industrialisasi Dengan Pembangunan Politik.....	110
G. Hubungan Modernisasi dan Industrialisasi	111
H. Rangkuman Materi	112
BAB 7 PEMBANGUNAN POLITIK DAN GLOBALISASI	115
A. Konsep Pembangunan Politik	116
B. Pengertian Globalisasi	118
C. Dampak Globalisasi terhadap Pembangunan Politik.....	122
D. Rangkuman Materi	127
BAB 8 INTEGRASI NASIONAL	131
A. Pengertian Integrasi Nasional.....	132
B. Bentuk Integrasi Nasional.....	134
C. Jenis Integrasi Nasional	135
D. Pentingnya Integrasi Nasional Terhadap Pembangunan Politik ..	136
E. Rangkuman Materi	140
BAB 9 HAK ASASI MANUSIA (HAM), DEMOKRASI,	
 DAN DEMOKRATISASI	143
A. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sejarahnya.....	144

B. Demokrasi.....	149
C. Demokratisasi.....	154
D. Rangkuman Materi	156
BAB 10 MASYARAKAT MADANI DAN PENDIDIKAN POLITIK	159
A. Pendahuluan.....	160
B. Pengertian Masyarakat Madani	161
C. Pengertian Pendidikan Politik.....	164
D. Peran Agen Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik	167
E. Rangkuman Materi	168
BAB 11 GOOD GOVERNANCE DAN BIROKRASI.....	173
A. Pendahuluan.....	174
B. Ciri-Ciri <i>Good Governance</i>	177
C. Paradigma <i>Good Governance</i>	178
D. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	179
E. Manfaat <i>Good Governance</i>	183
F. Birokrasi.....	183
G. Paradigma Birokrasi Pemerintahan.....	187
H. Fungsi Birokrasi Pemerintahan.....	188
I. Rangkuman Materi	188
BAB 12 MOBILITAS SOSIAL DAN EKONOMI TERHADAP PELEMBAGAAN SISTEM POLITIK	191
A. Pendahuluan.....	192
B. Rincian Pembahasan Materi.....	194
C. Rangkuman Materi	202
GLOSARIUM	205
PROFIL PENULIS	211